



PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DI DAERAH DALAM PENCAPAIAN TARGET MDGs

Dr. Arum Atmawikarta, MPH
Sekretaris Eksekutif - Sekretariat MDGs Nasional
Ketua III IAKMI

Disampaikan dalam acara Mukernas Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat
Indonesia (IAKMI) Pontianak, 9 Juli 2012

OUTLINE

- **Pendahuluan**
- **Posisi Pencapaian MDGs Indonesia di ASEAN**
- **Pencapaian MDGs di Indonesia**
- **Upaya Percepatan Pencapaian MDGs di Indonesia**
- **Peran Pemangku Kepentingan di Daerah dalam Pencapaian Target MDGs**



PENDAHULUAN

Millennium Development Goals (MDGs)

***'Komitmen Negara terhadap rakyat Indonesia dan
Komitmen Indonesia kepada masyarakat global'***

- Suatu kesepakatan dan kemitraan global untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat ditunjukkan oleh paket berisi tujuan yang mempunyai batas waktu dan target terukur**
- Komitmen Indonesia mencapai MDGs adalah komitmen meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia**

Diformulasikan di *UN Millennium Summit* (New York, Sept, 2000)

8 TUJUAN MDGs

TUJUAN 1 : MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN

TUJUAN 2 : MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA

**TUJUAN 3 : MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

TUJUAN 4 : MENURUNKAN KEMATIAN ANAK

TUJUAN 5 : MENINGKATKAN KESEHATAN IBU

**TUJUAN 6 : MENGENDALIKAN HIV DAN AIDS, MALARIA DAN
PENYAKIT MENULAR LAINNYA (TB)**

TUJUAN 7 : MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

**TUJUAN 8 : MENGEMBANGKAN KEMITRAAN PEMBANGUNAN DI
TINGKAT GLOBAL**



KESEJAHTERAAN RAKYAT



TUJUAN 1 : MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN

TUJUAN 2 : MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA

**TUJUAN 3 : MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

TUJUAN 4 : MENURUNKAN KEMATIAN ANAK

TUJUAN 5 : MENINGKATKAN KESEHATAN IBU

**TUJUAN 6 : MENGENDALIKAN HIV DAN AIDS, MALARIA DAN
PENYAKIT MENULAR LAINNYA (TB)**

TUJUAN 7 : MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

**TUJUAN 8 : MENGEMBANGKAN KEMITRAAN PEMBANGUNAN DI
TINGKAT GLOBAL**

Struktur Koordinasi Organisasi MDGs Nasional-Daerah

PENANGGUNG JAWAB
Menteri PPN/Kepala Bappenas

TIM PENGARAH
Ketua : Wamen PPN
Sekretaris : Deputi SDM
Anggota: Eselon I LS

Tim Penasehat

SEKRETARIAT MDGs NASIONAL

POKJA I: Kemiskinan
POKJA II: Pendidikan
POKJA III: Gender Perempuan
POKJA IV: Kematian Anak
POKJA V: Kesehatan Ibu
POKJA VI: Kesehatan
POKJA VII: Lingkungan
POKJA VIII: Kemitraan

TIM PENGARAH PROVINSI
Penanggung Jawab : Kepala Daerah
Sekretaris : Kepala Bappeda
Anggota Kepala Dinas Terkait

SEKRETARIAT MDGs PROVINSI

**POKJA I
KEMISKINAN**

**POKJA II
PENDIDIKAN &
GENDER**

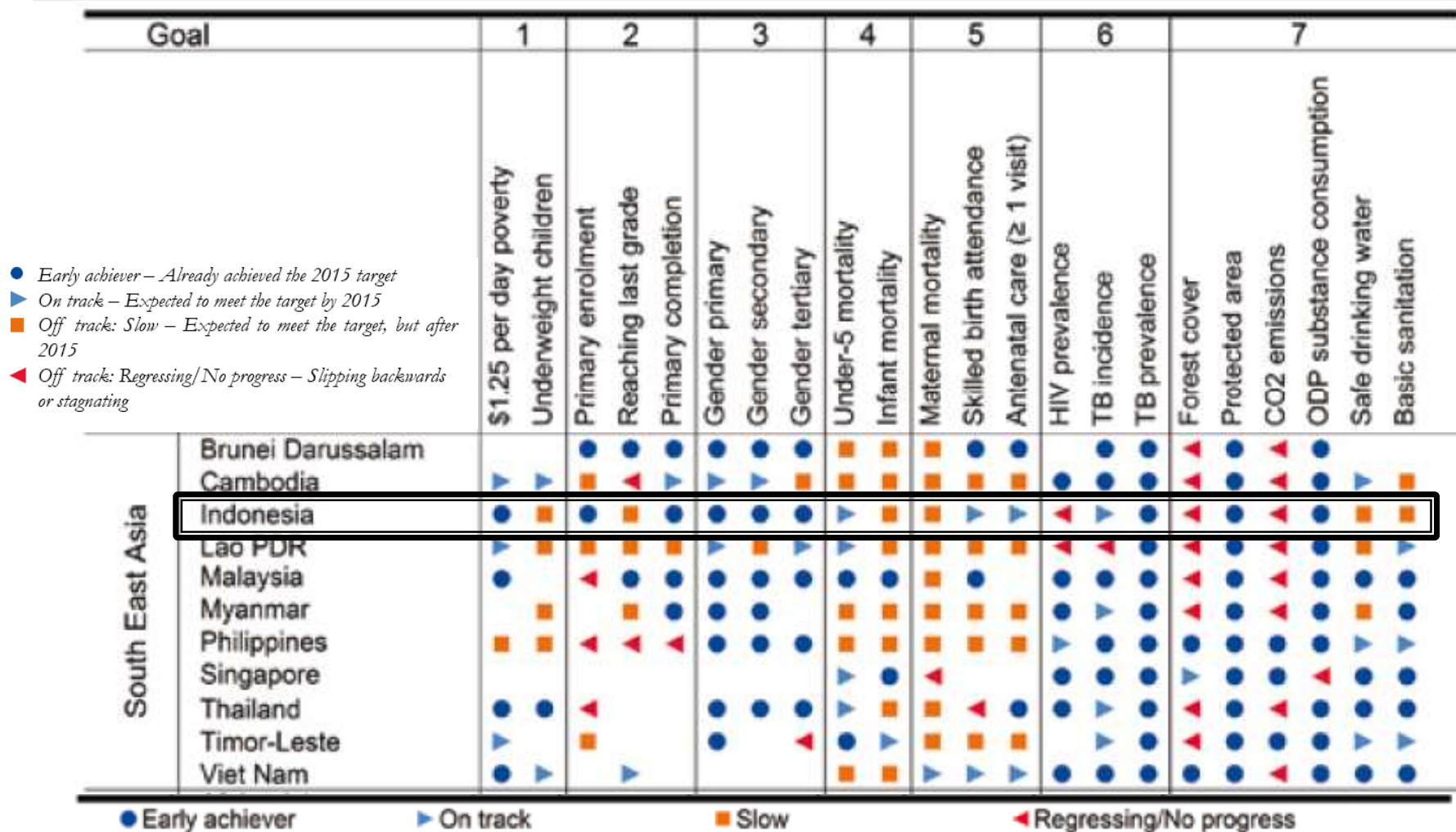
**POKJA III
KESEHATAN**

**POKJA IV
LINGKUNGAN**



POSISI PENCAPAIAN MDGs INDONESIA DI ASEAN

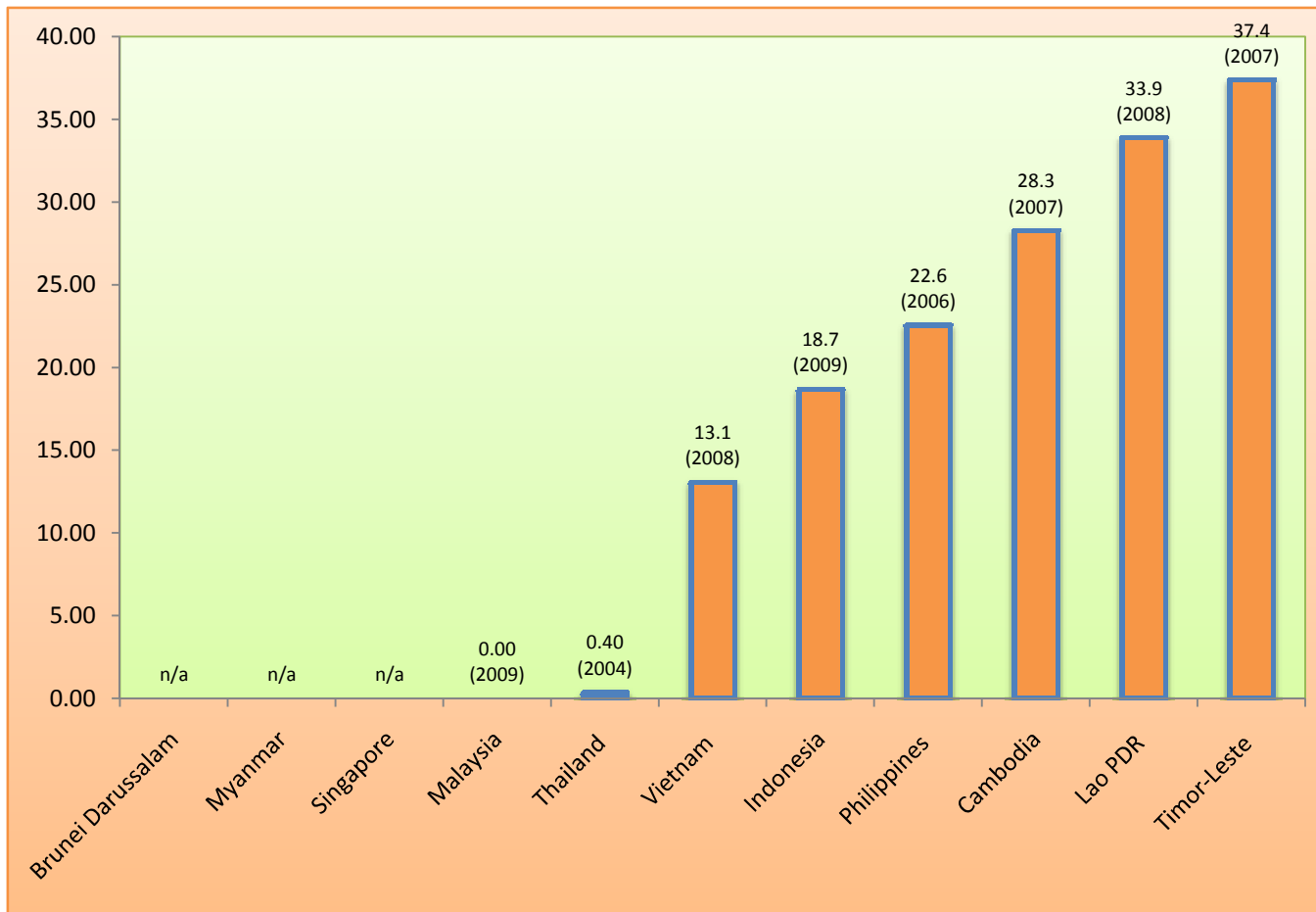
Perkembangan MDG Asia Tenggara



Source: Staff calculations based on the United Nations MDG Database.



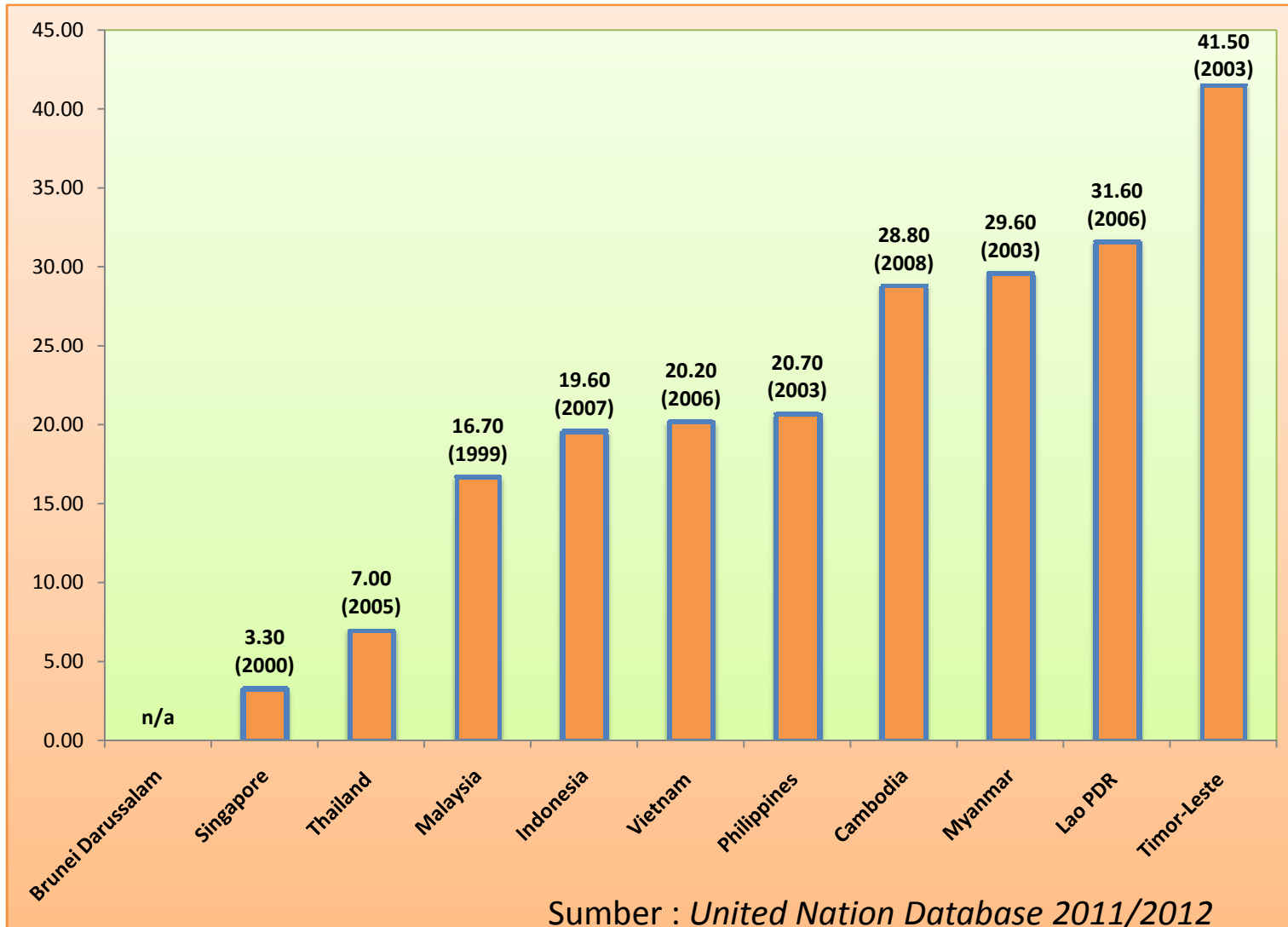
Proportion of population below \$1.25 (PPP) per day, per cent



Sumber : *United Nation Database 2011/2012*



Underweight Children Under 5 years old

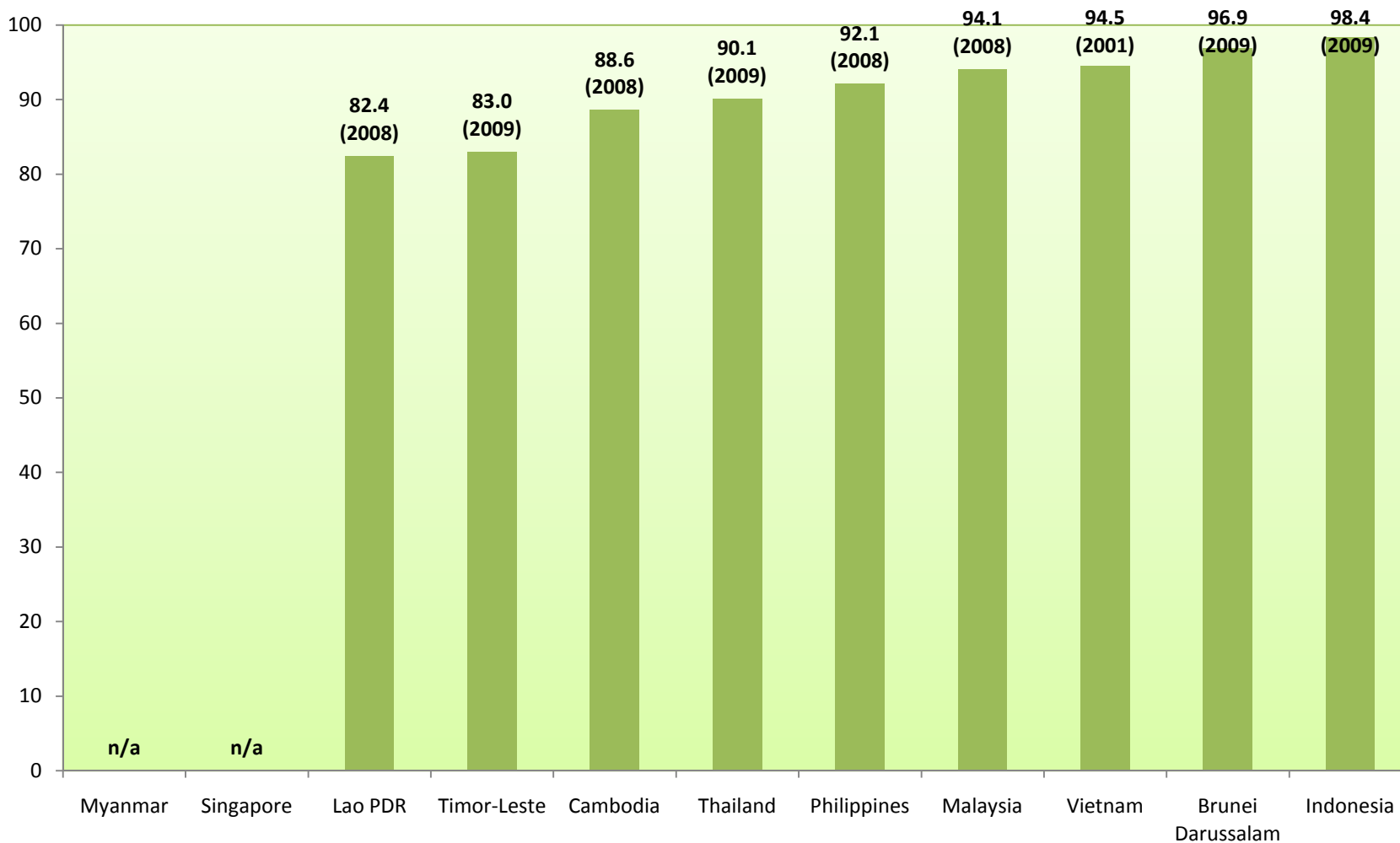




2

ACHIEVE UNIVERSAL
PRIMARY EDUCATION

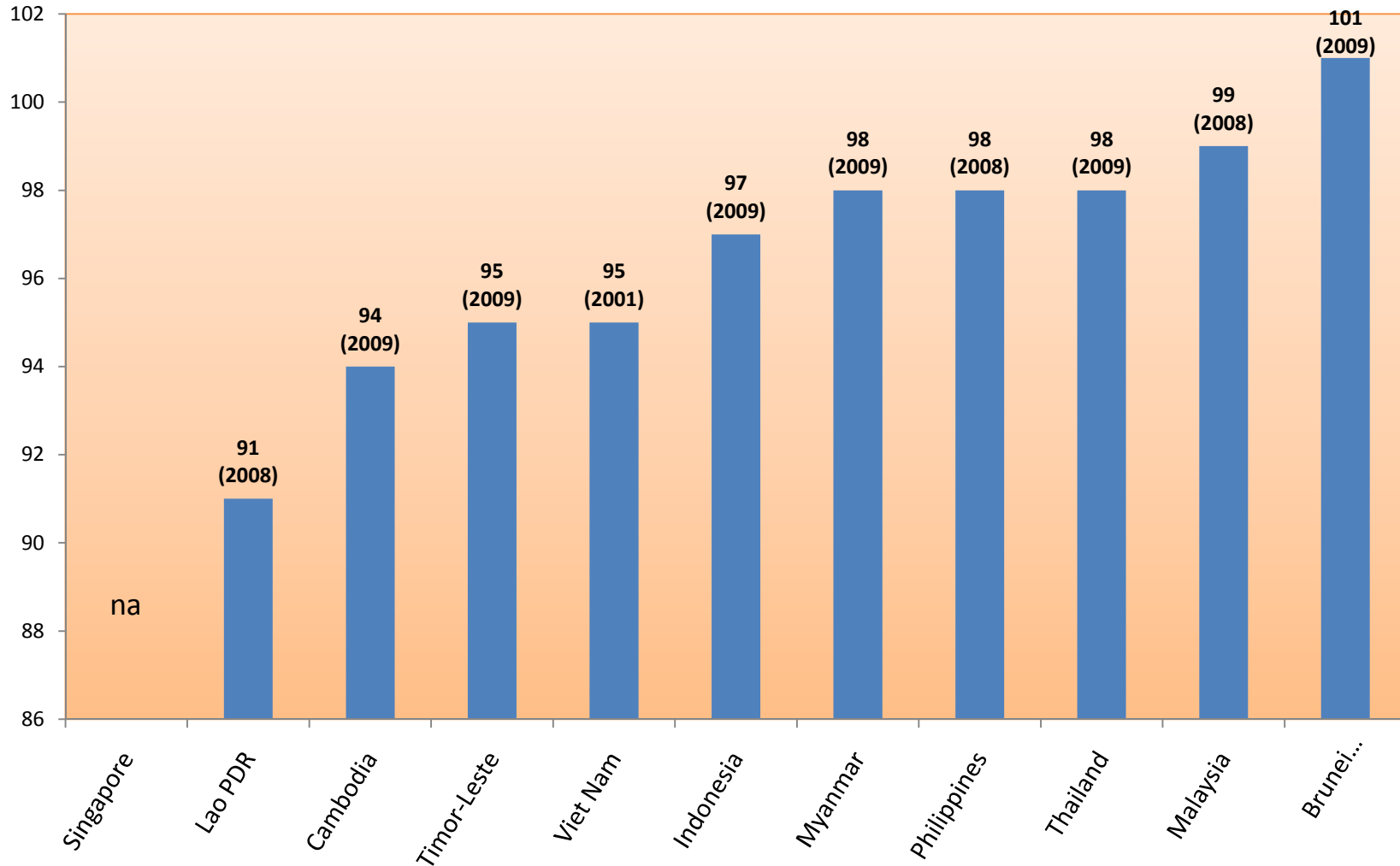
Primary Enrolment Ratio



Sumber : *United Nation Database 2011/2012*



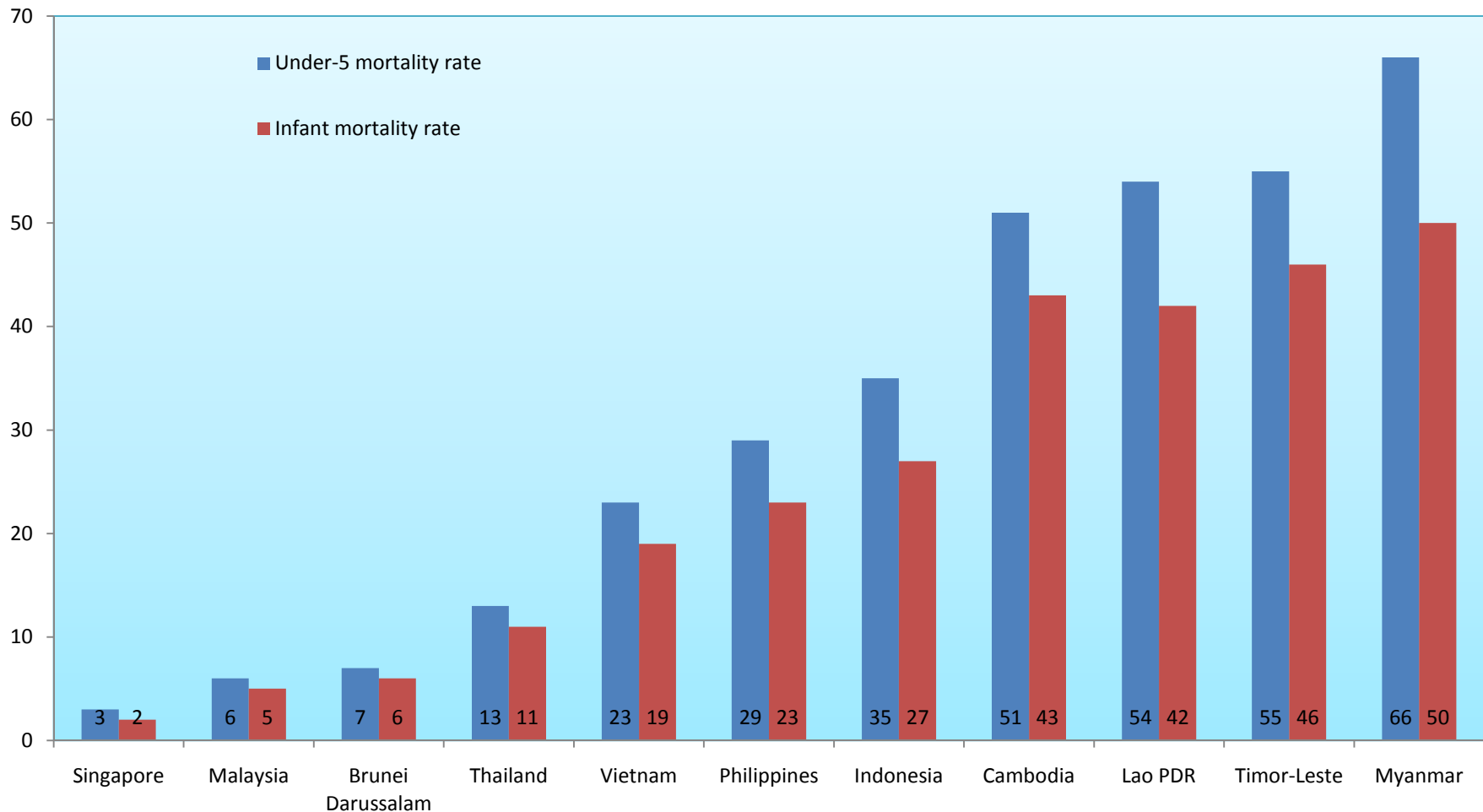
Gender Parity Index In Primary



Sumber : United Nation Database 2011/2012



Under-5 Mortality Rate and Infant Mortality Rate (per 1,000 live births)

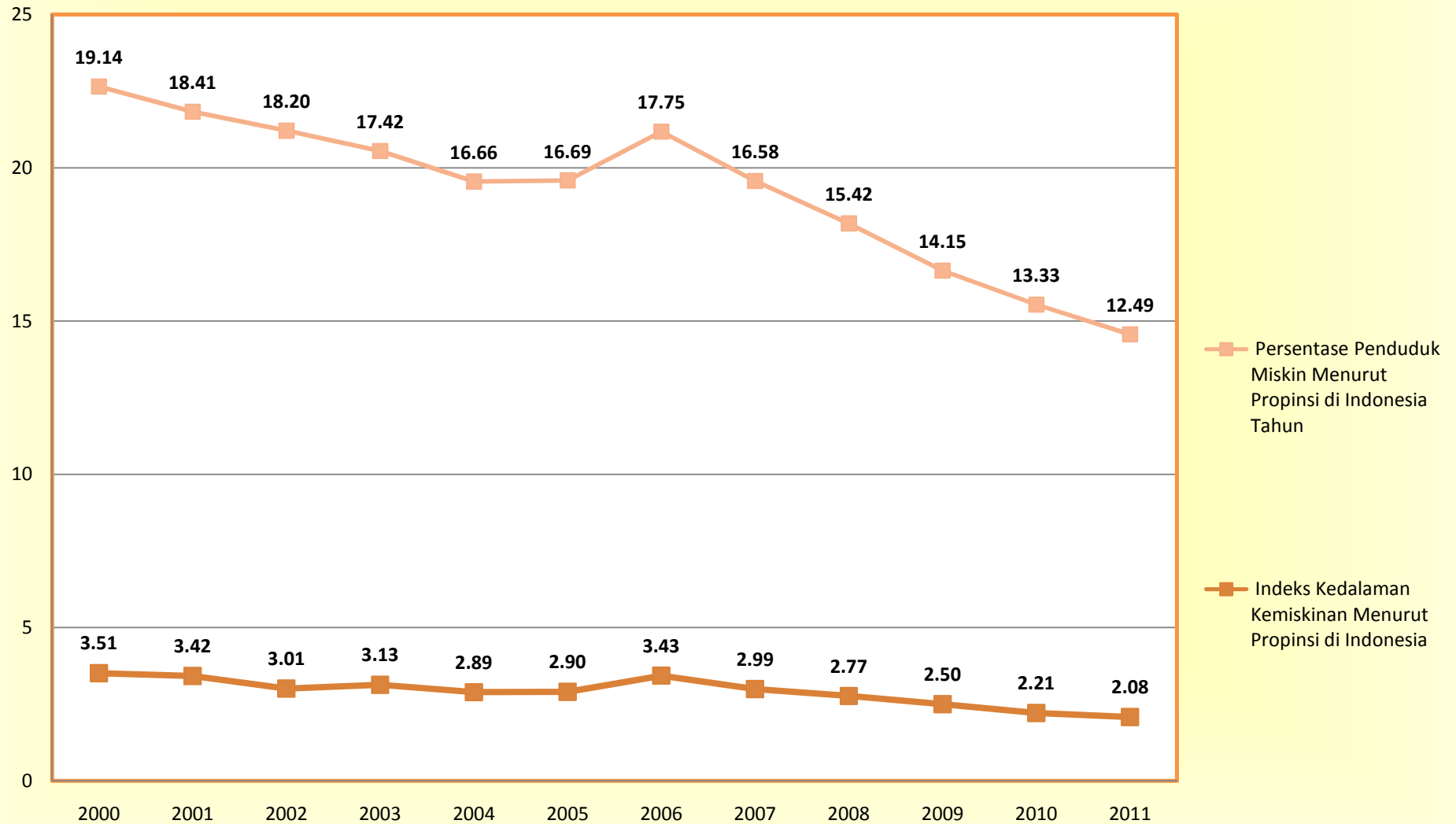


Sumber : *United Nation Database 2011/2012*



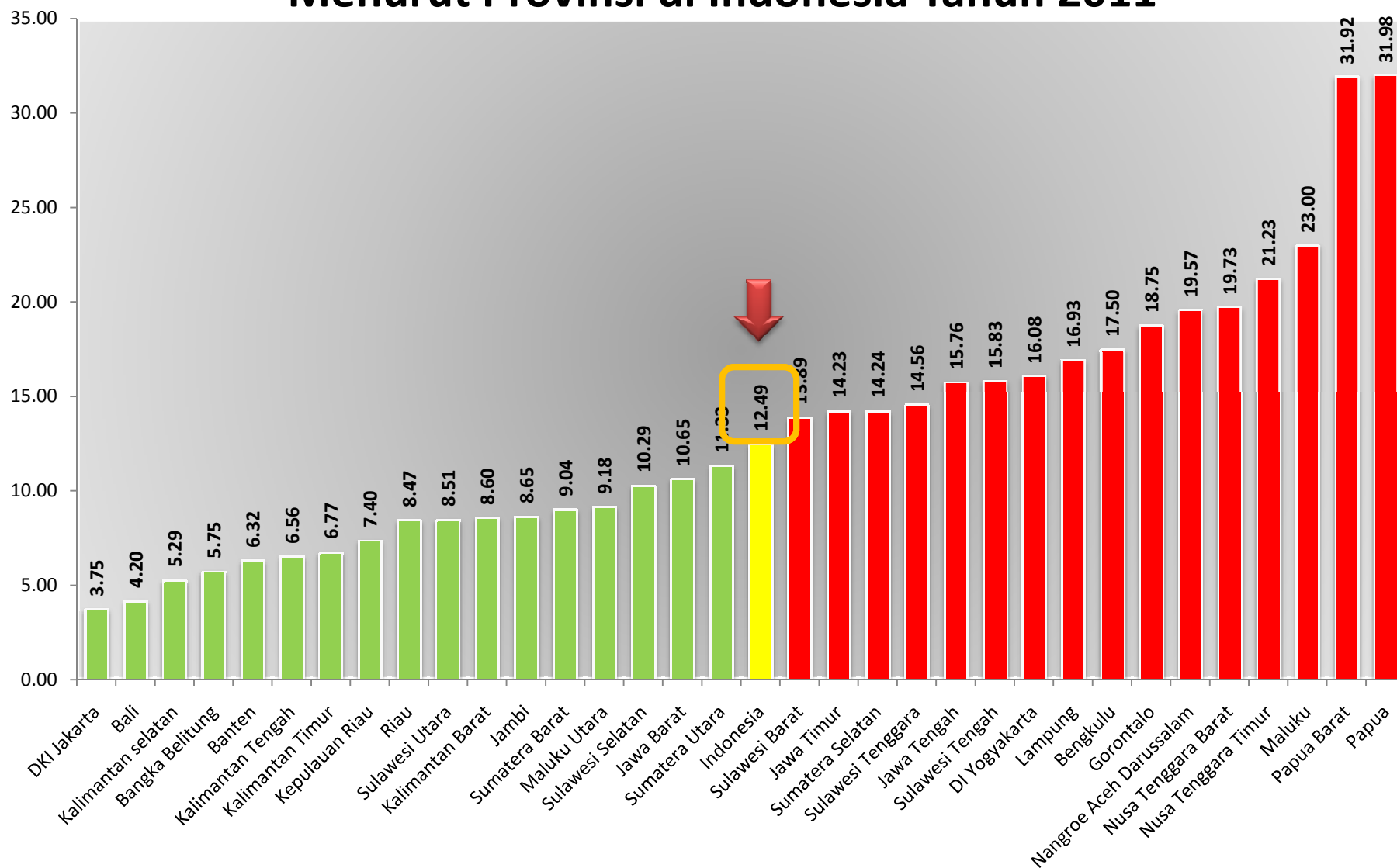
PENCAPAIAN MDGs DI INDONESIA

Persentase Penduduk Miskin dan Indeks Kedalaman Kemiskinan Indonesia Tahun 2000 - 2011



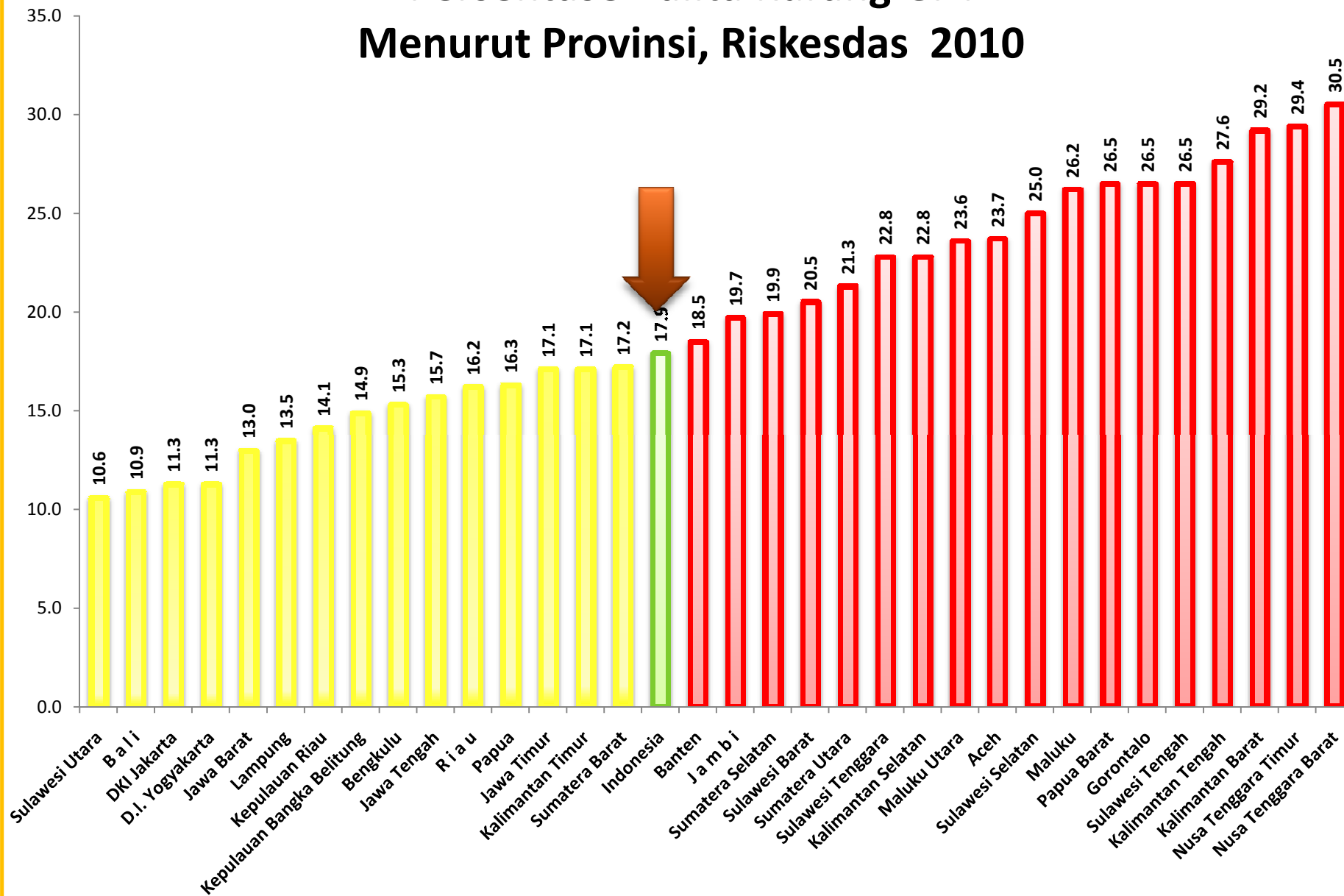
Sumber: BPS, Susenas berbagai tahun

Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011

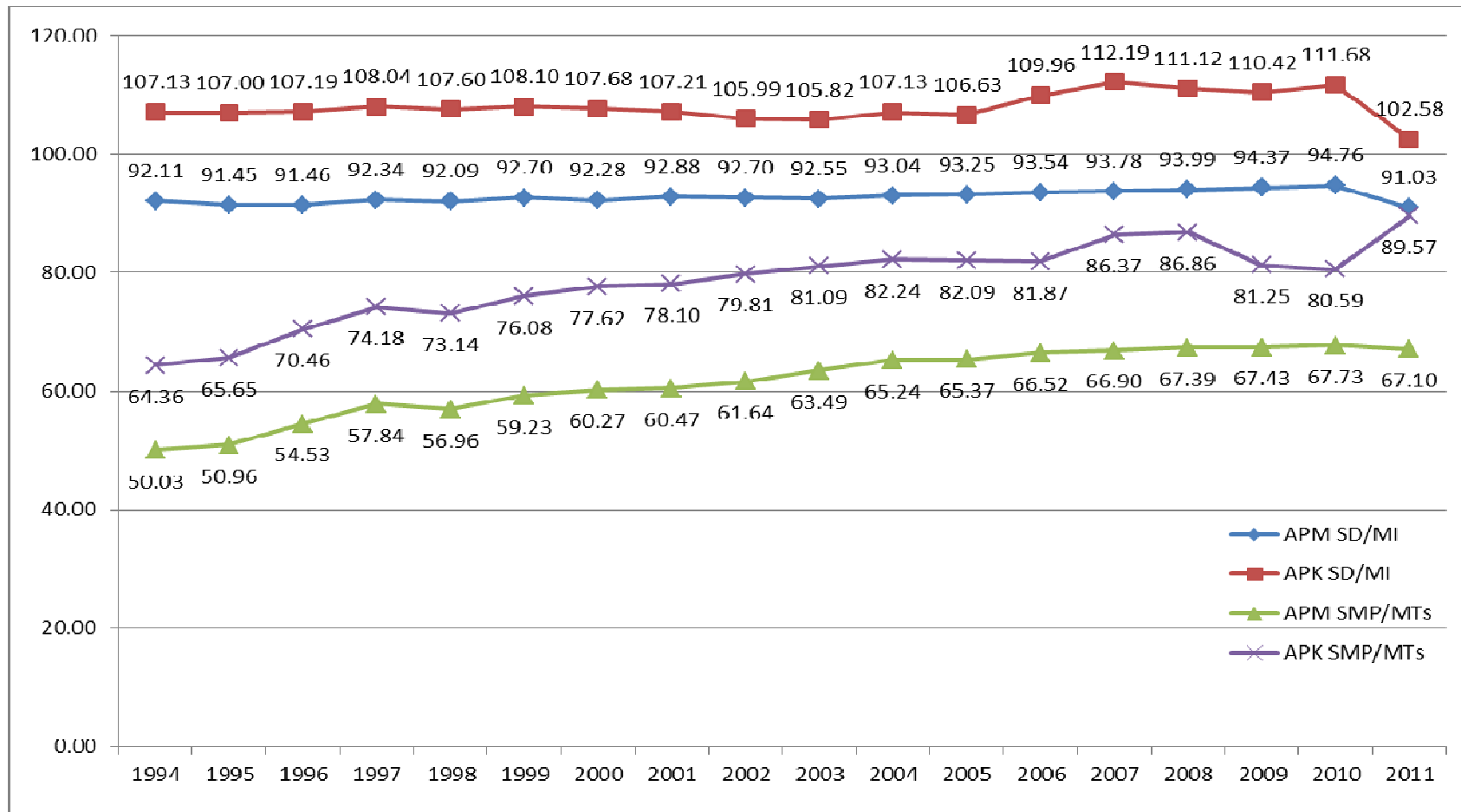


Sumber: BPS, Susenas 2011

Persentase Balita Kurang Gizi Menurut Provinsi, Riskedas 2010

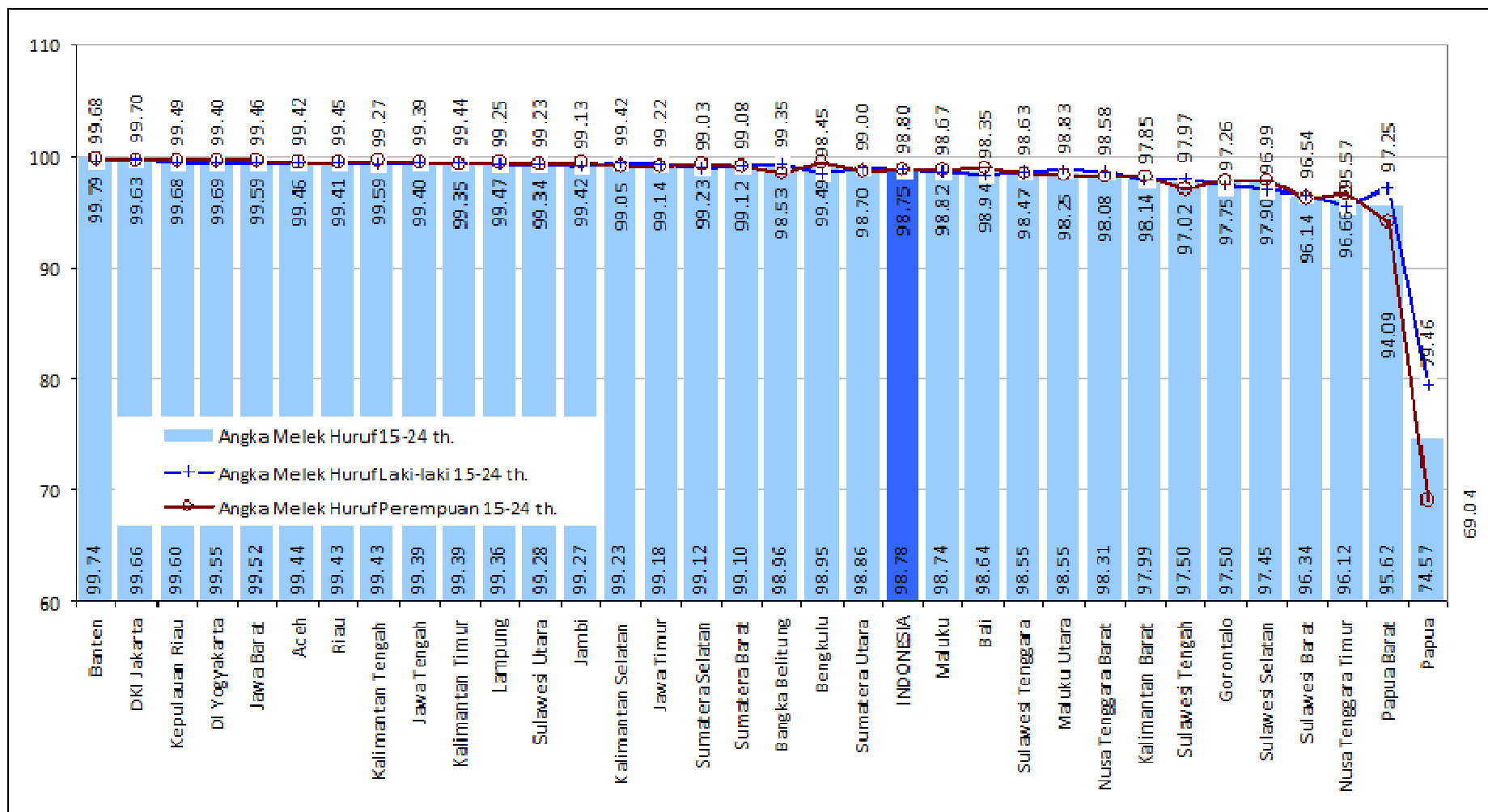


Perkembangan APM dan APK Jenjang SD/MI dan SMP/MTs tahun 1994-2011



Sumber: BPS, Susenas 1994-2011

Angka Melek Huruf Penduduk Berusia 15-24 Tahun Menurut Provinsi, 2011



Sumber: Susenas, BPS

Rasio APM Perempuan Terhadap Laki-laki di SD

	2007	2008	2009	2010	2011
Indonesia	99.69	99.84	99.73	99.86	98,80

Rasio APM Perempuan Terhadap Laki-laki di SMP

	2007	2008	2009	2010	2011
Indonesia	102	102	101.99	102.02	103,45

Rasio APM Perempuan Terhadap Laki-laki di SMA

	2007	2008	2009	2010	2011
Indonesia	98.84	99.28	96.13	96.04	101,40

Rasio APM Perempuan Terhadap Laki-laki di Perguruan Tinggi

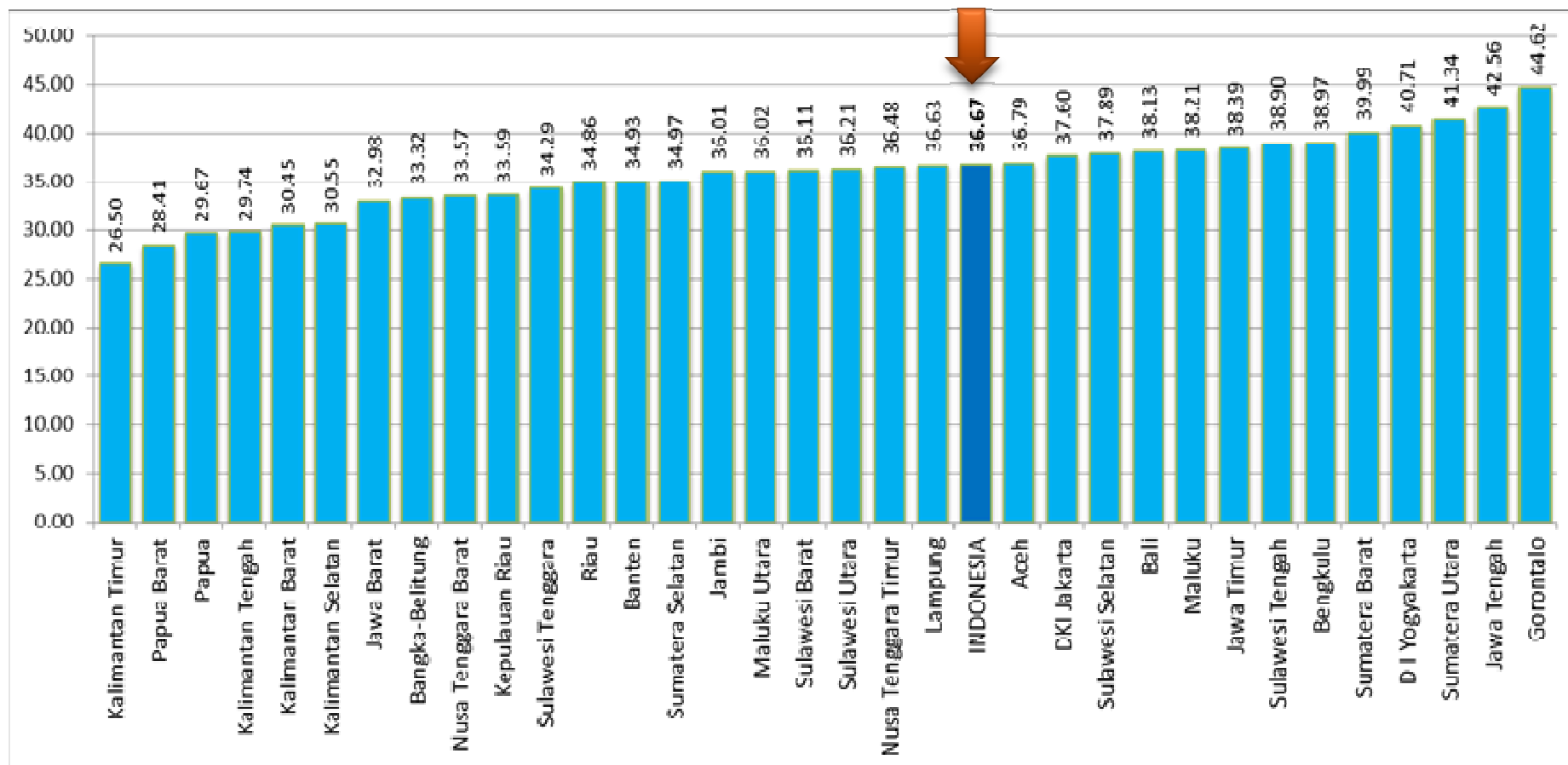
	2007	2008	2009	2010	2011
Indonesia	107.90	107.99	102.95	102.11	97,82

Rasio Angka Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-laki Umur 15-24 tahun

	2007	2008	2009	2010	2011
Indonesia	99.85	99.84	99.85	99.93	99,95

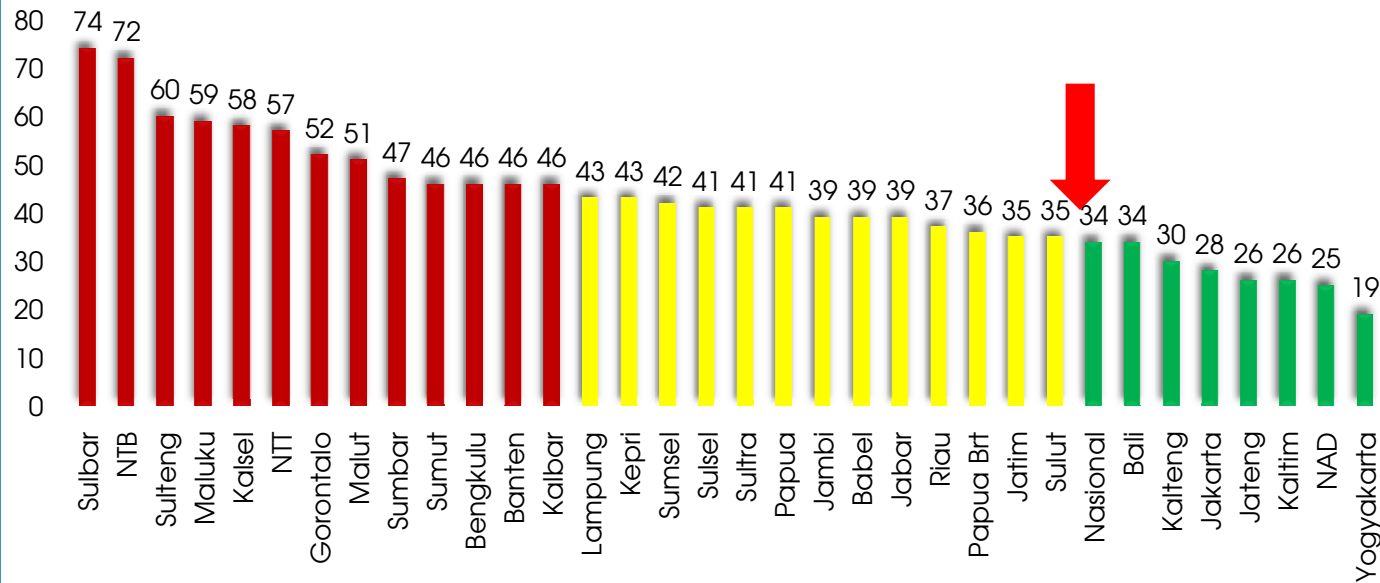
Sumber: Susenas, BPS

Keragaman Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan di Sektor non-Pertanian Antar-Provinsi, 2011



Sumber: BPS, Sakernas 2011

Angka Kematian Bayi di Indonesia, 2007



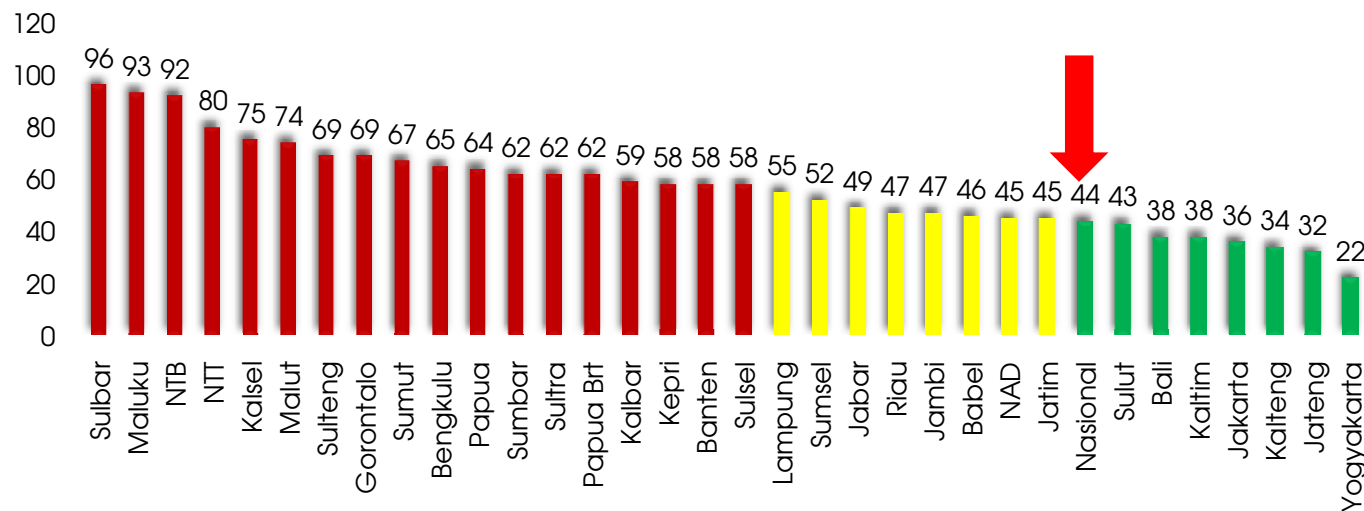
Nasional

- AKB : 34
- AKBA : 44

AKB :

- Sumatera : 25-47
- Jawa-Bali : 19-46
- Nusa Tenggara: 57-72
- Kalimantan : 26-58
- Sulawesi : 35-74
- Maluku : 51-59
- Papua : 36-41

Angka Kematian Balita di Indonesia, 2007

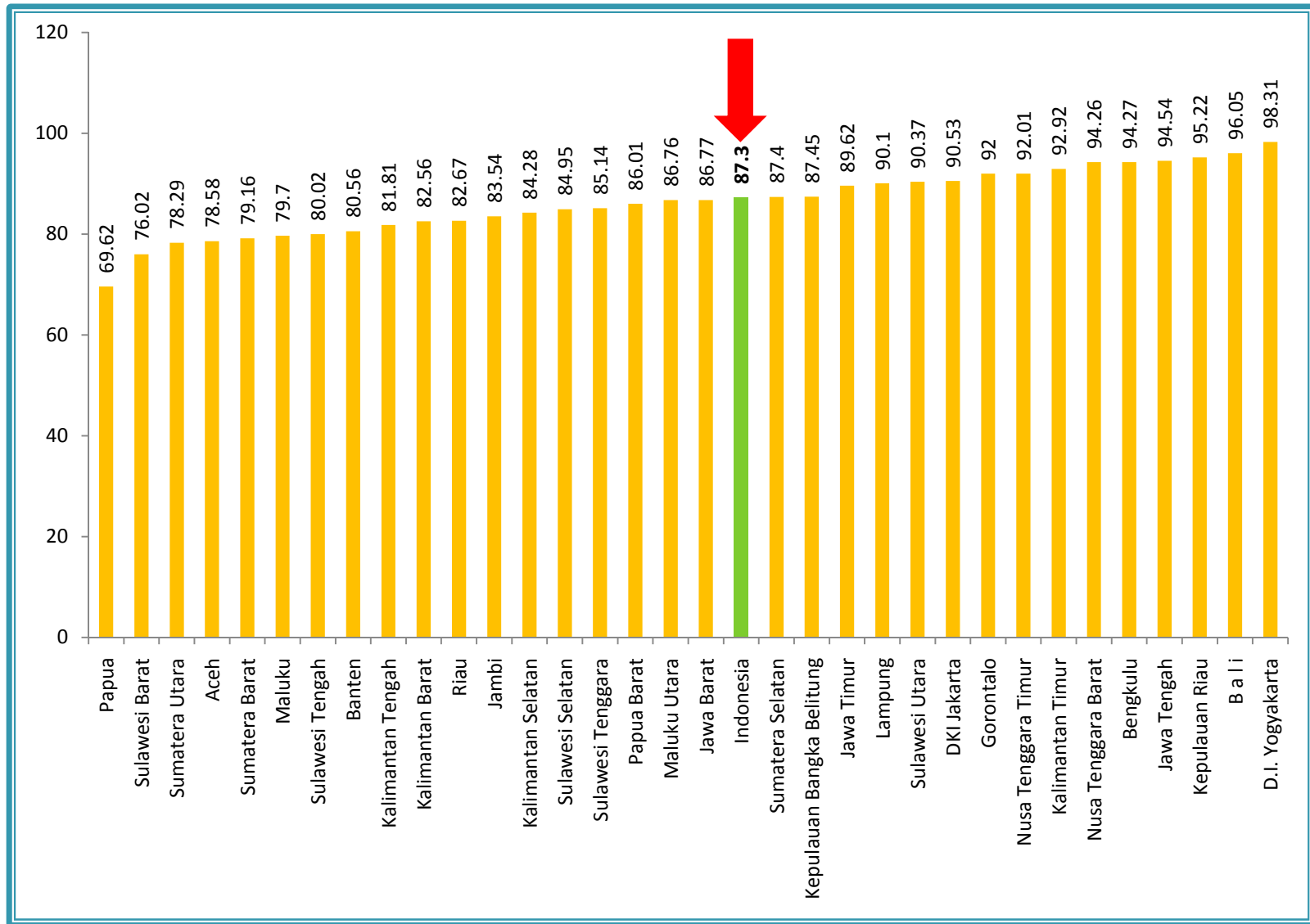


AKBA :

- Sumatera : 45-67
- Jawa-Bali : 22-58
- Nusa Tenggara: 80-92
- Kalimantan : 34-75
- Sulawesi : 43-96
- Maluku : 74-93
- Papua : 62-64

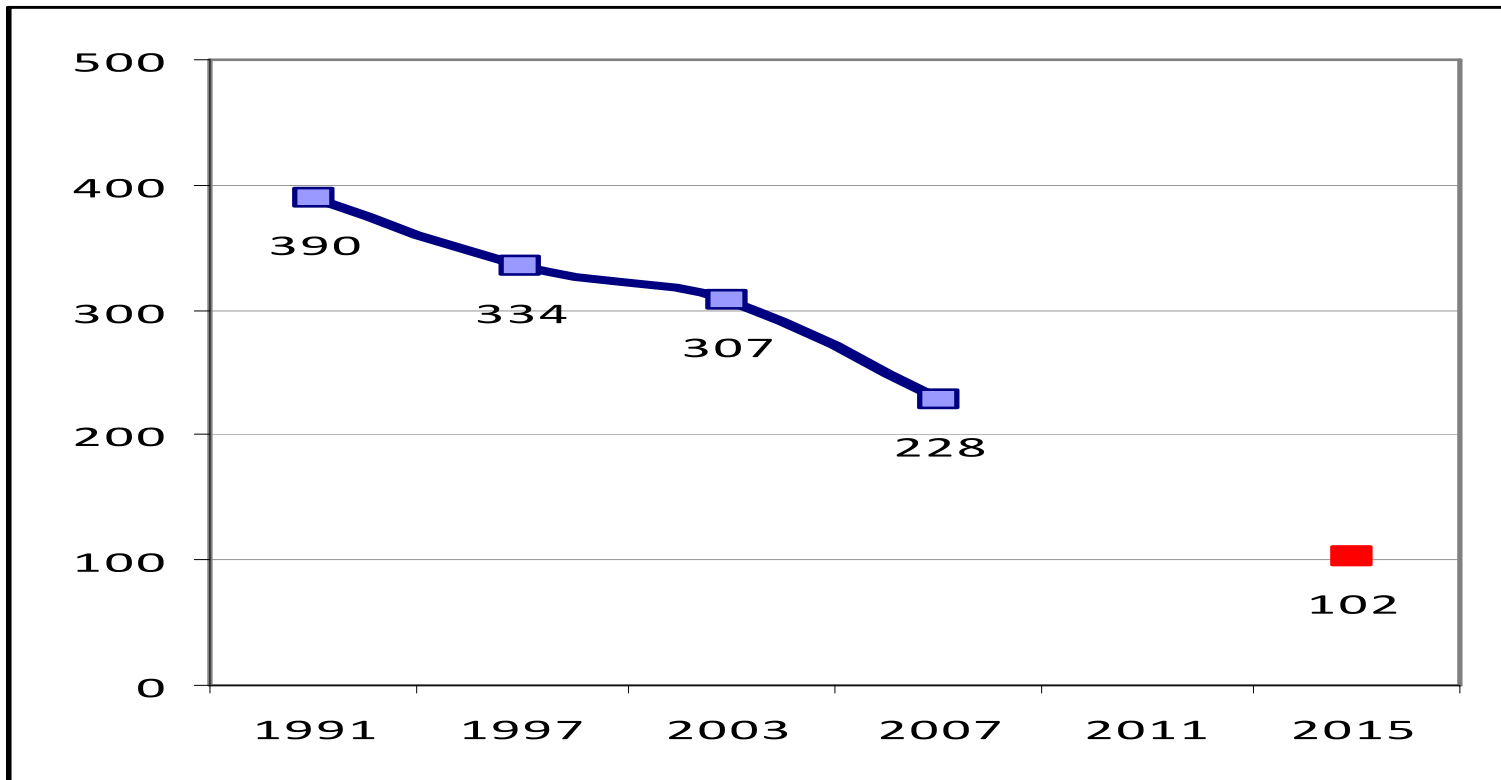
Sumber : SDKI, 2007

Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Pernah Dimunisasi Campak, Tahun 2011



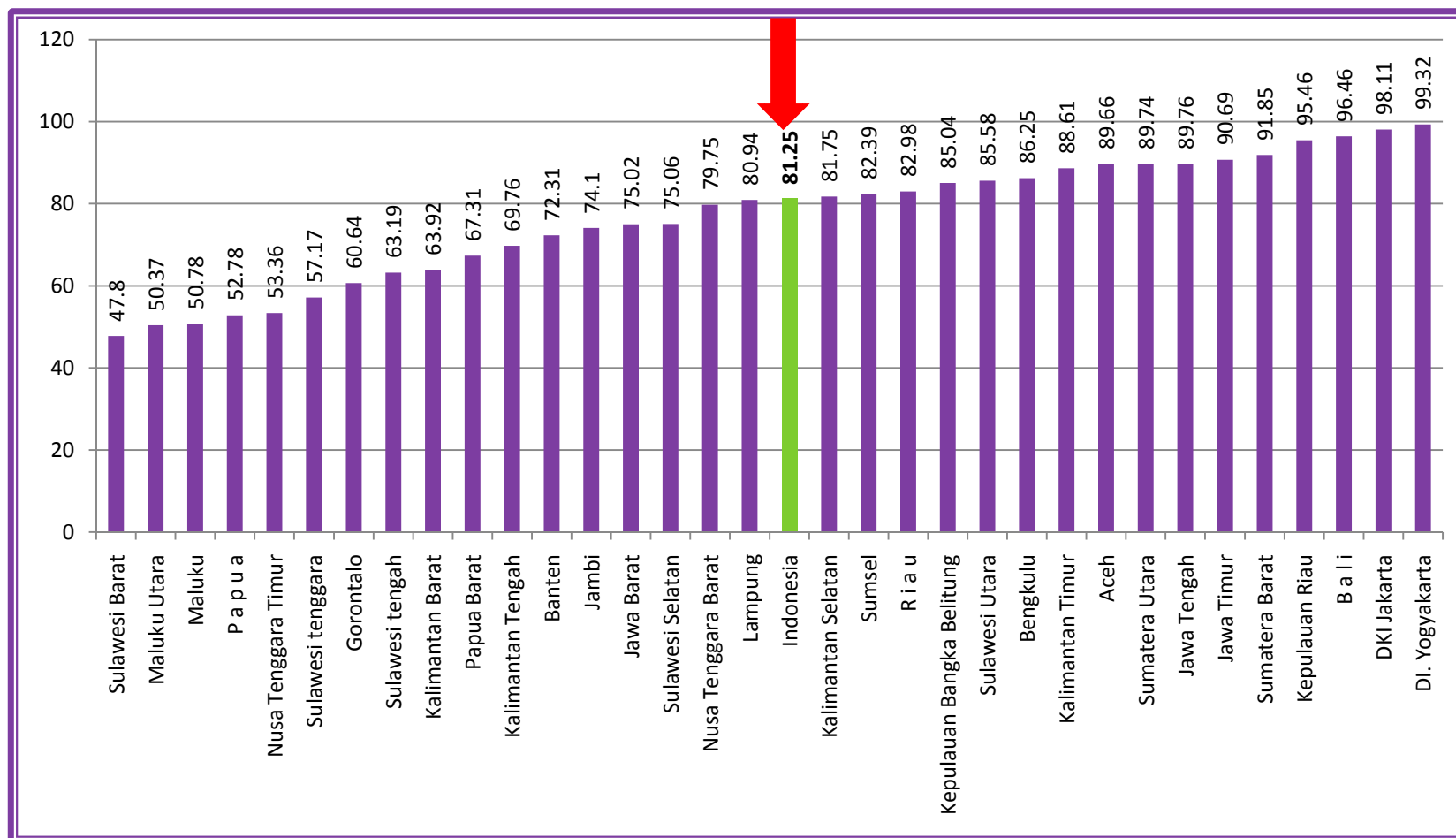
Sumber: Susenas 2011, BPS

Angka Kematian Ibu Dan Target MDG Tahun 2015



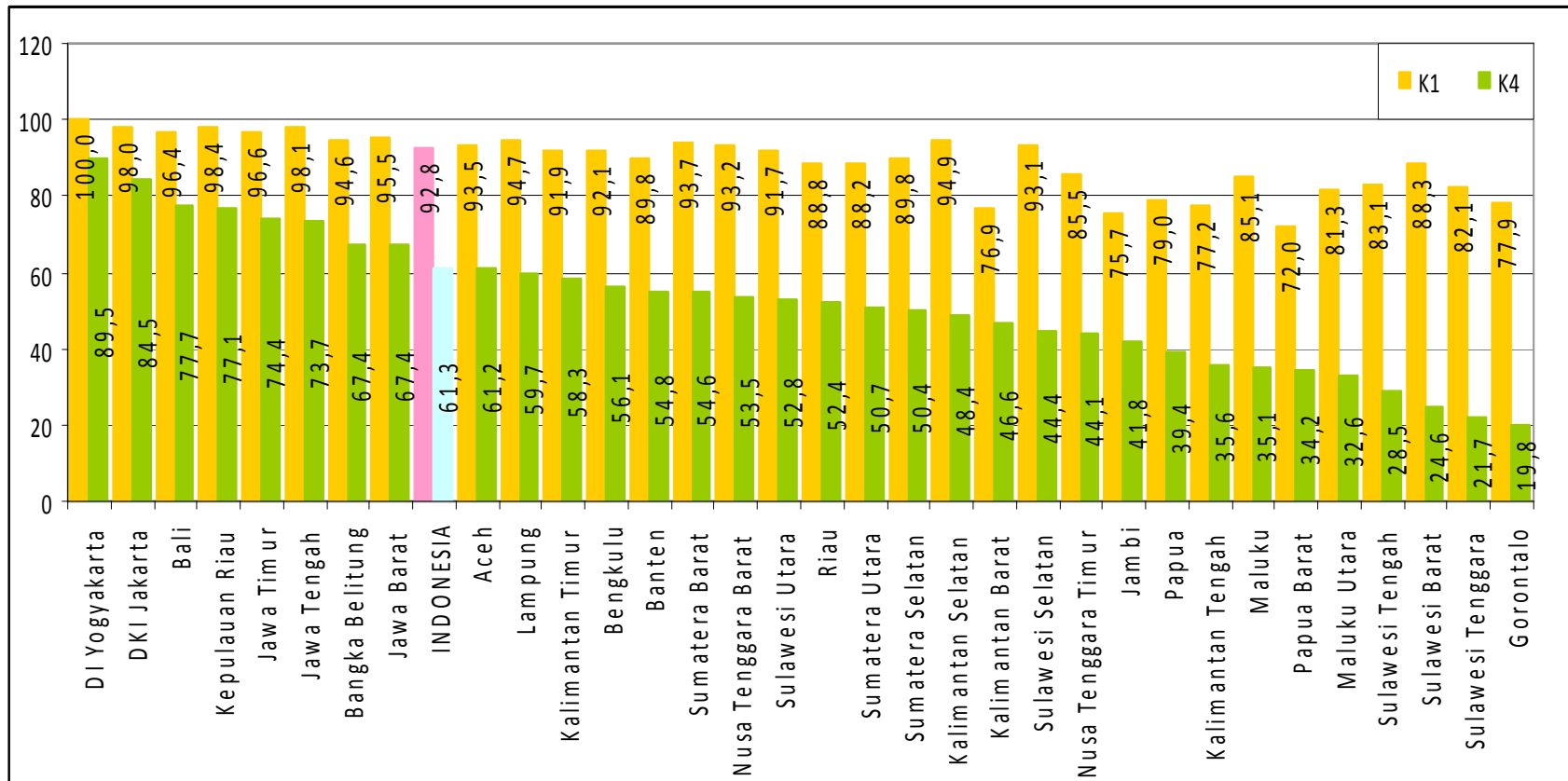
Sumber: BPS, SDKI berbagai tahun

Persentase Bayi yang Proses Kelahirannya Ditolong Tenaga Kesehatan di Perkotaan dan Pedesaan, Tahun 2011



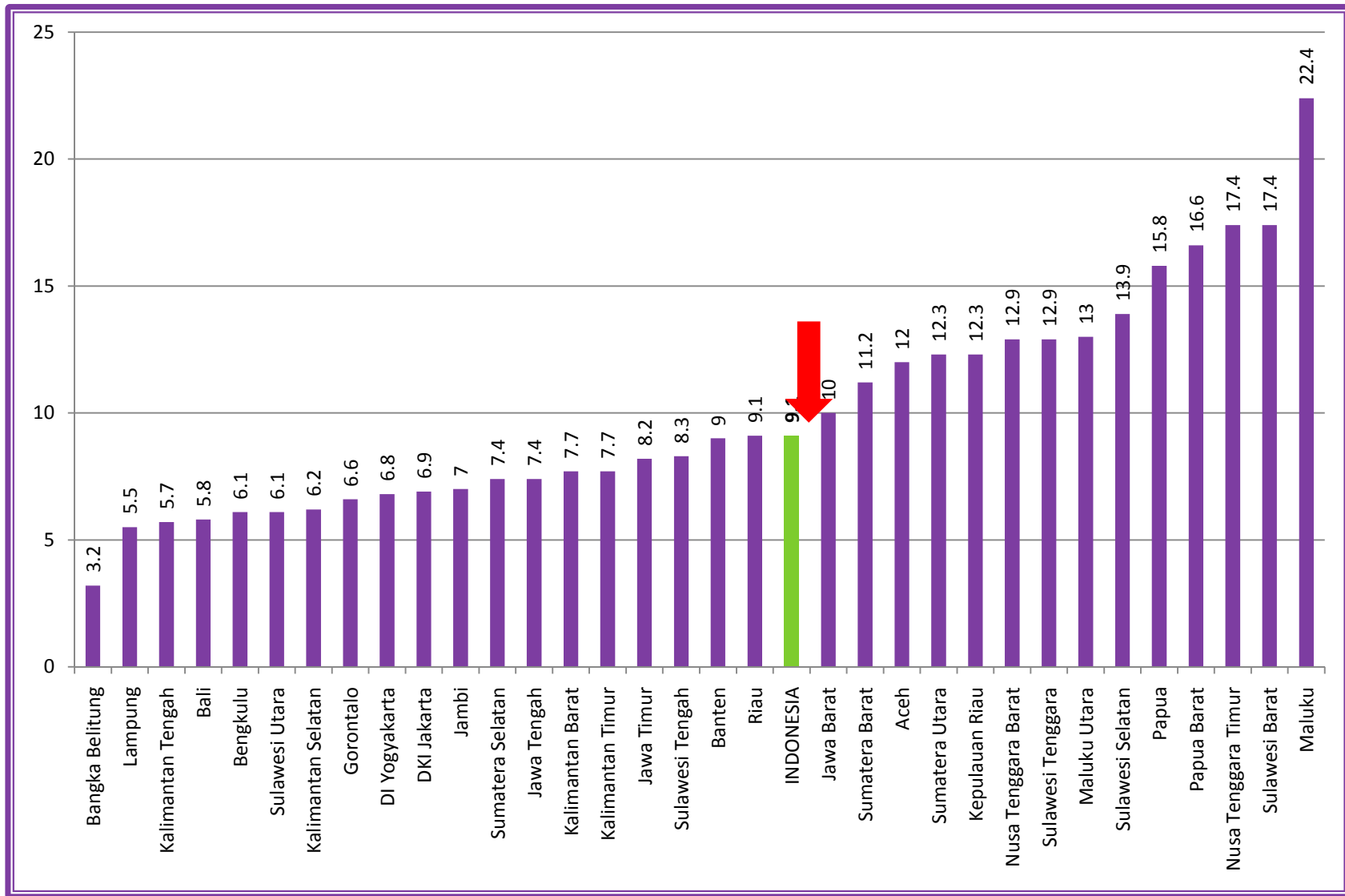
Sumber: Susenas 2011, BPS

Keragaman Layanan Antenatal K1 dan K4 Antarprovinsi, 2010



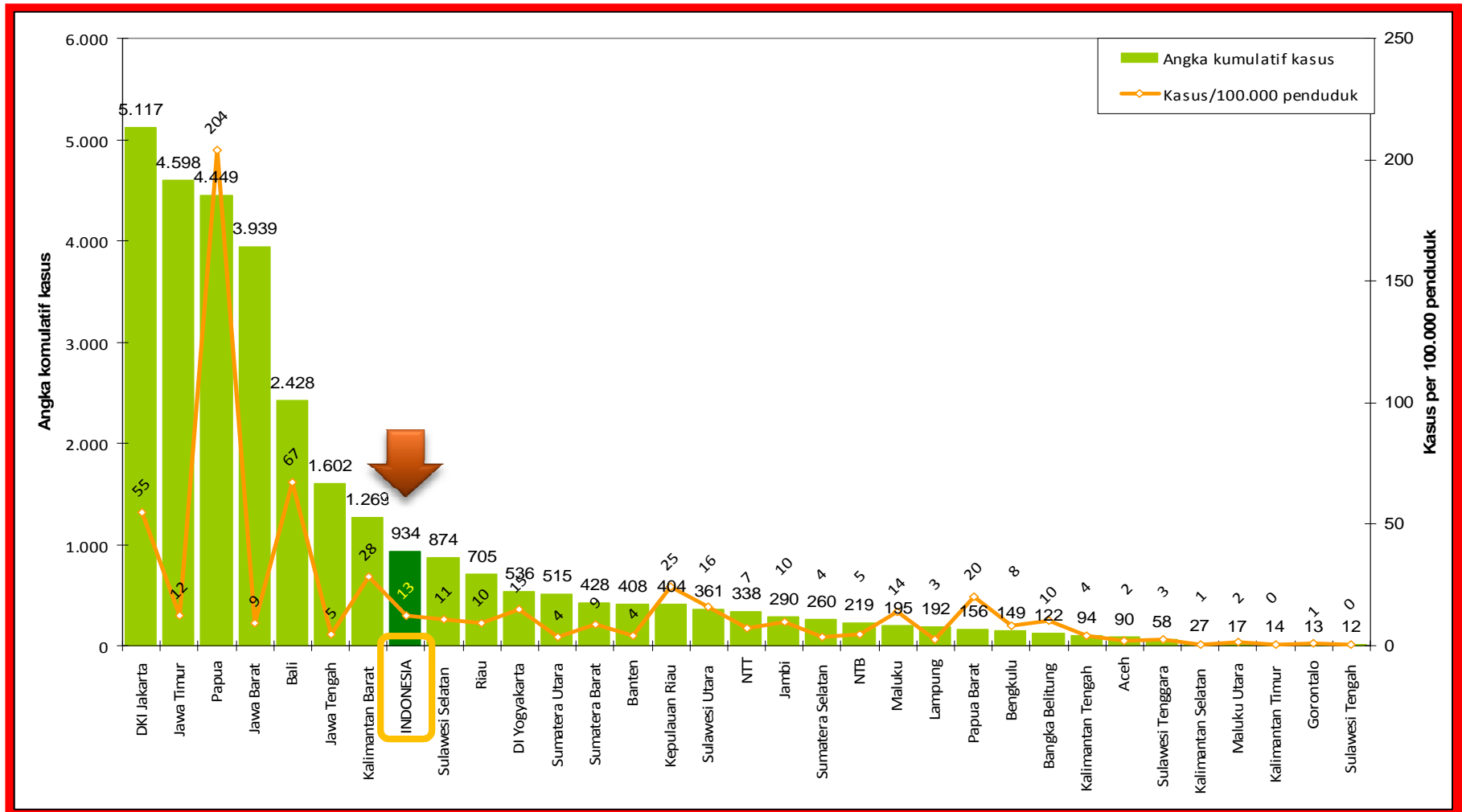
Sumber: Riskesdas (Kemenkes), 2010

Unmet Need Tahun 2007



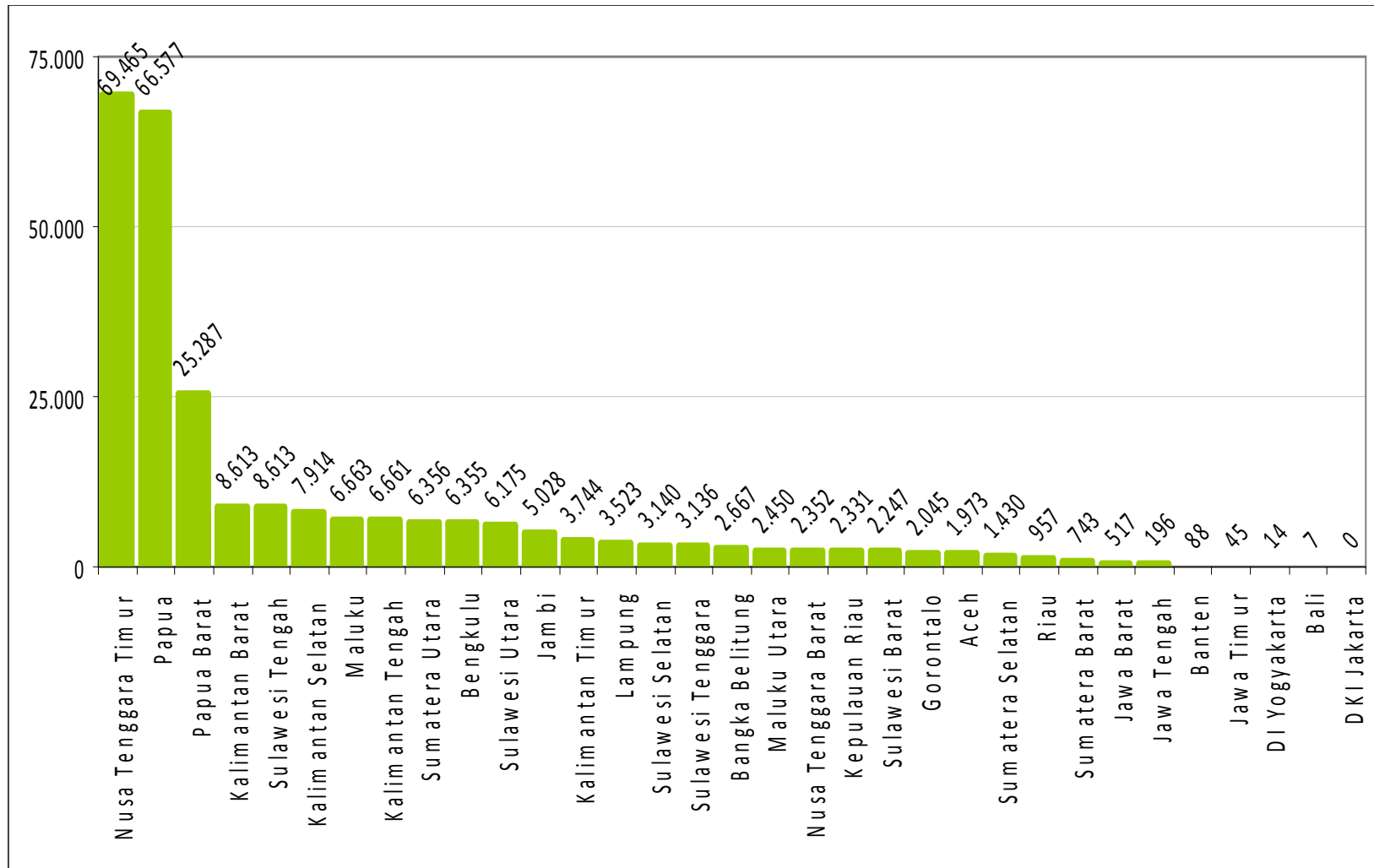
Sumber: SDKI 2007

Angka Kumulatif Kasus AIDS dan Angka Kumulatif Kasus AIDS per 100.000 Penduduk, Desember 2011



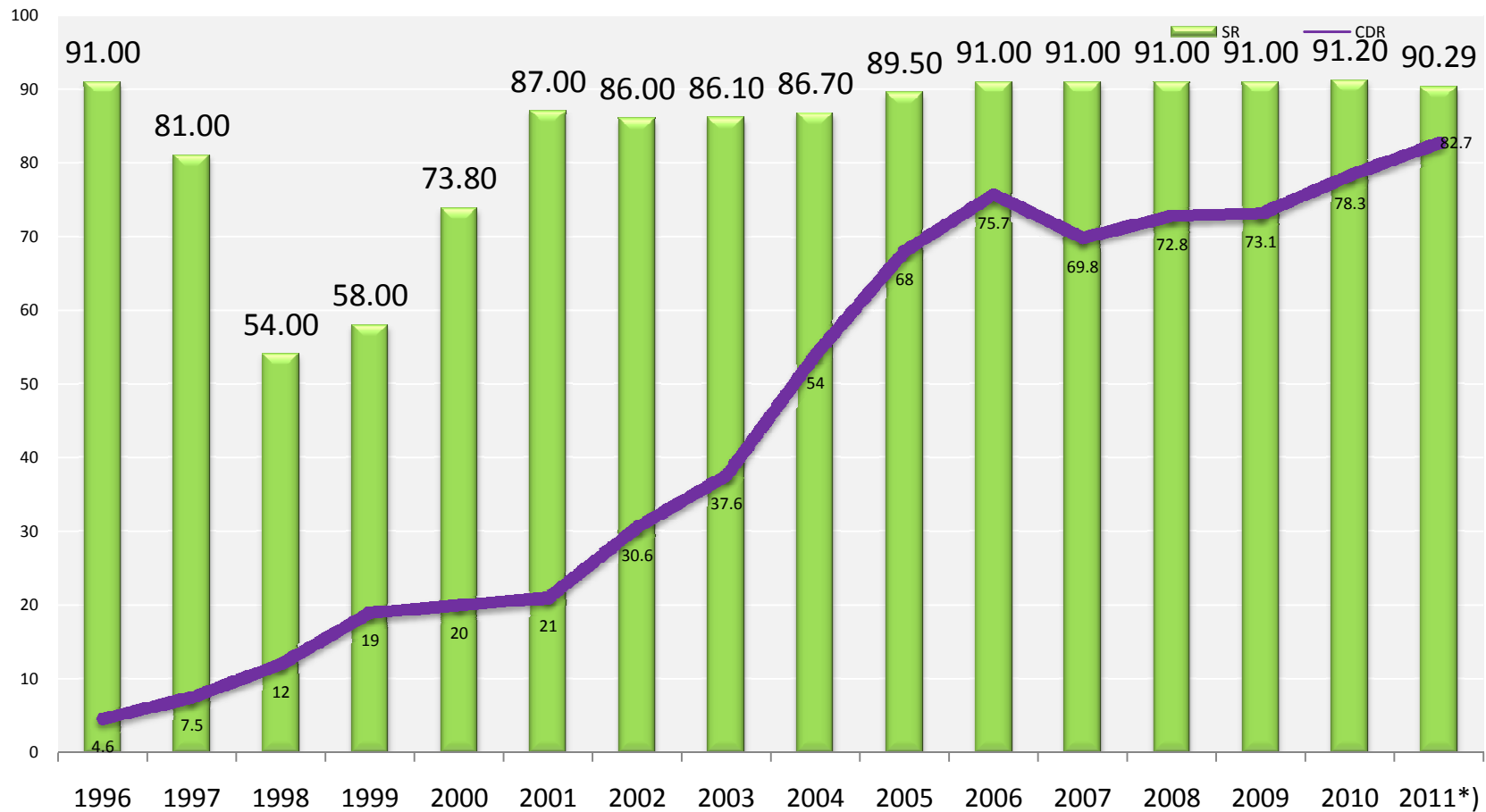
Sumber: Ditjen P2PL, Kemenkes 2011

Keragaman Angka Kejadian Malaria tahun 2010



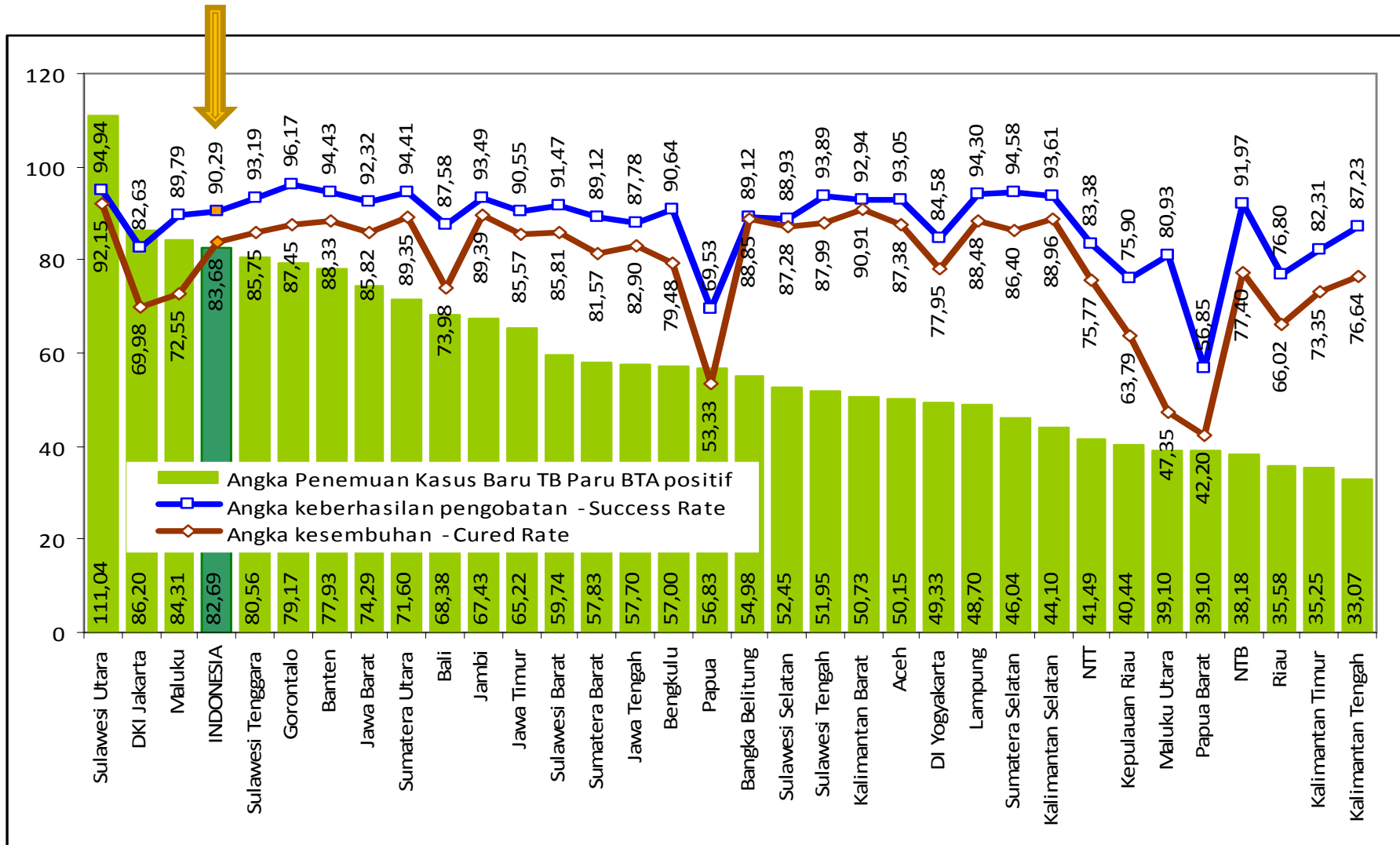
Sumber: Laporan Kemenkes, 2011

CDR & Success Rate Kasus TB Paru BTA Positif, Indonesia 1995-2011*)



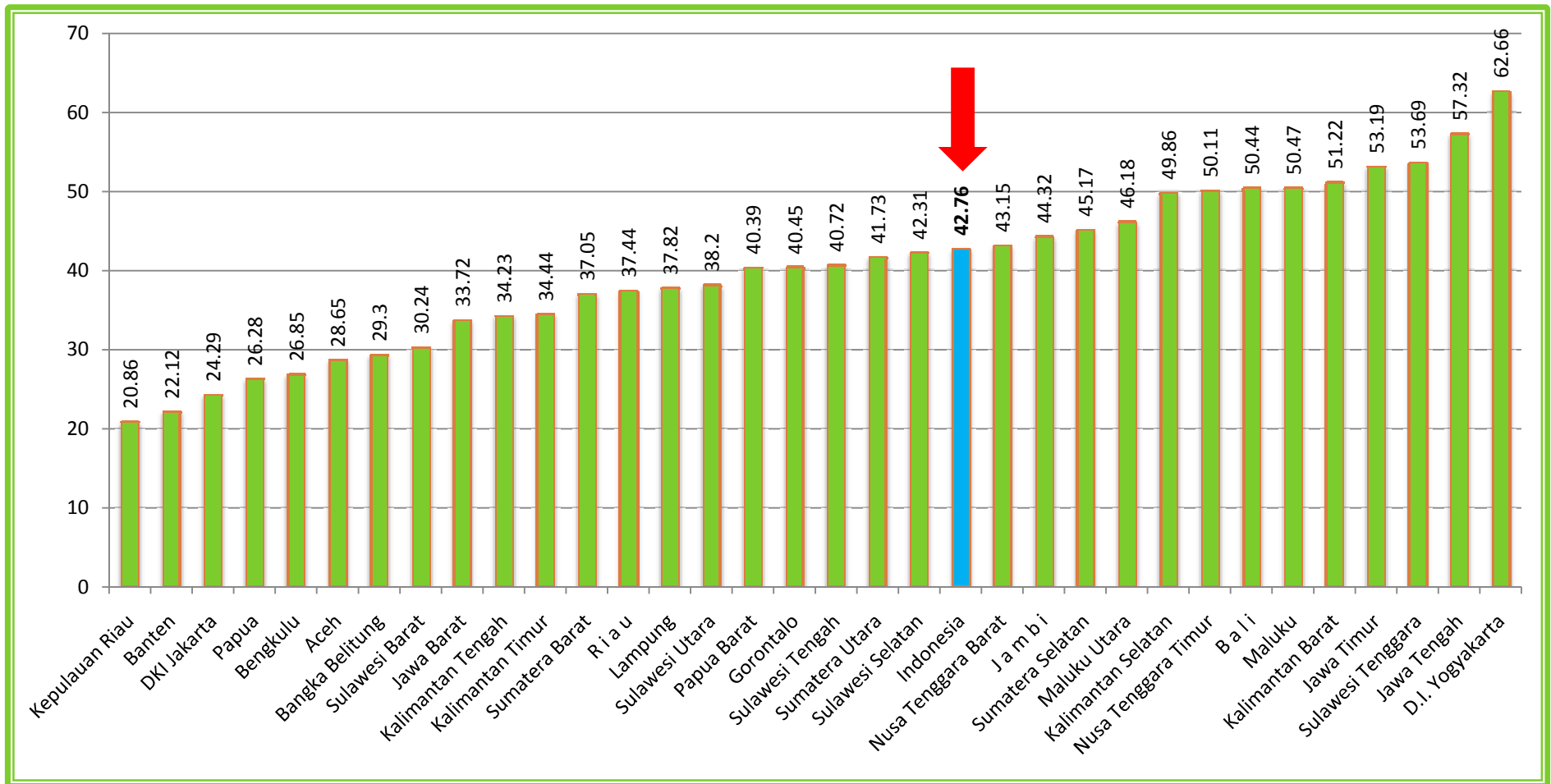
Sumber: Kementerian Kesehatan

Keragaman Angka Penemuan Kasus Baru, Keberhasilan Pengobatan dan Kesembuhan TB, 2011



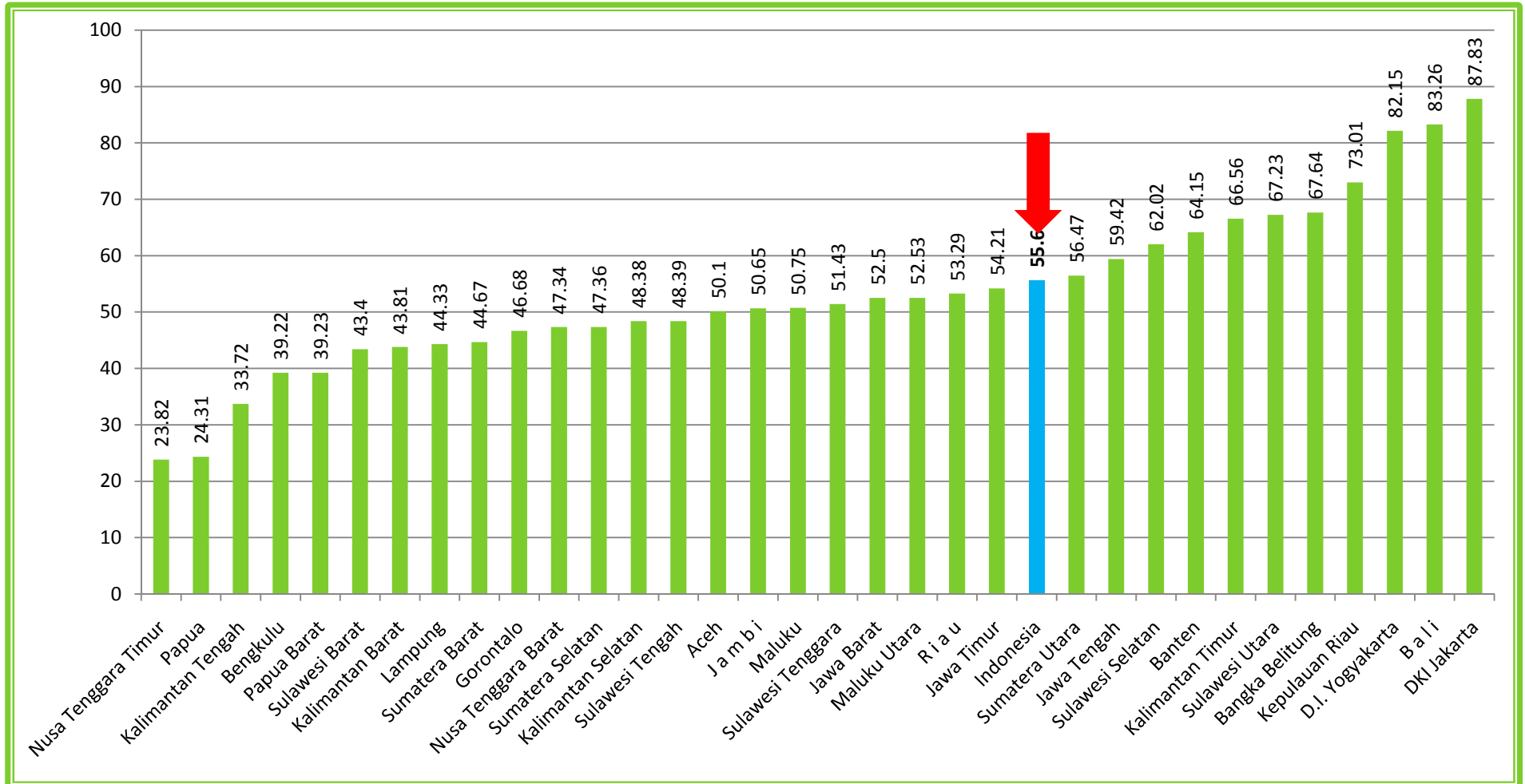
Sumber: Laporan Kemenkes, 2011

Persentase Rumah Tangga menurut Kriteria Kelayakan Sumber Air Minum Perkotaan & Pedesaan Tahun 2011



Sumber: Susenas 2011, BPS

Persentase Rumah Tangga menurut Kriteria Kelayakan Sanitasi Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2011

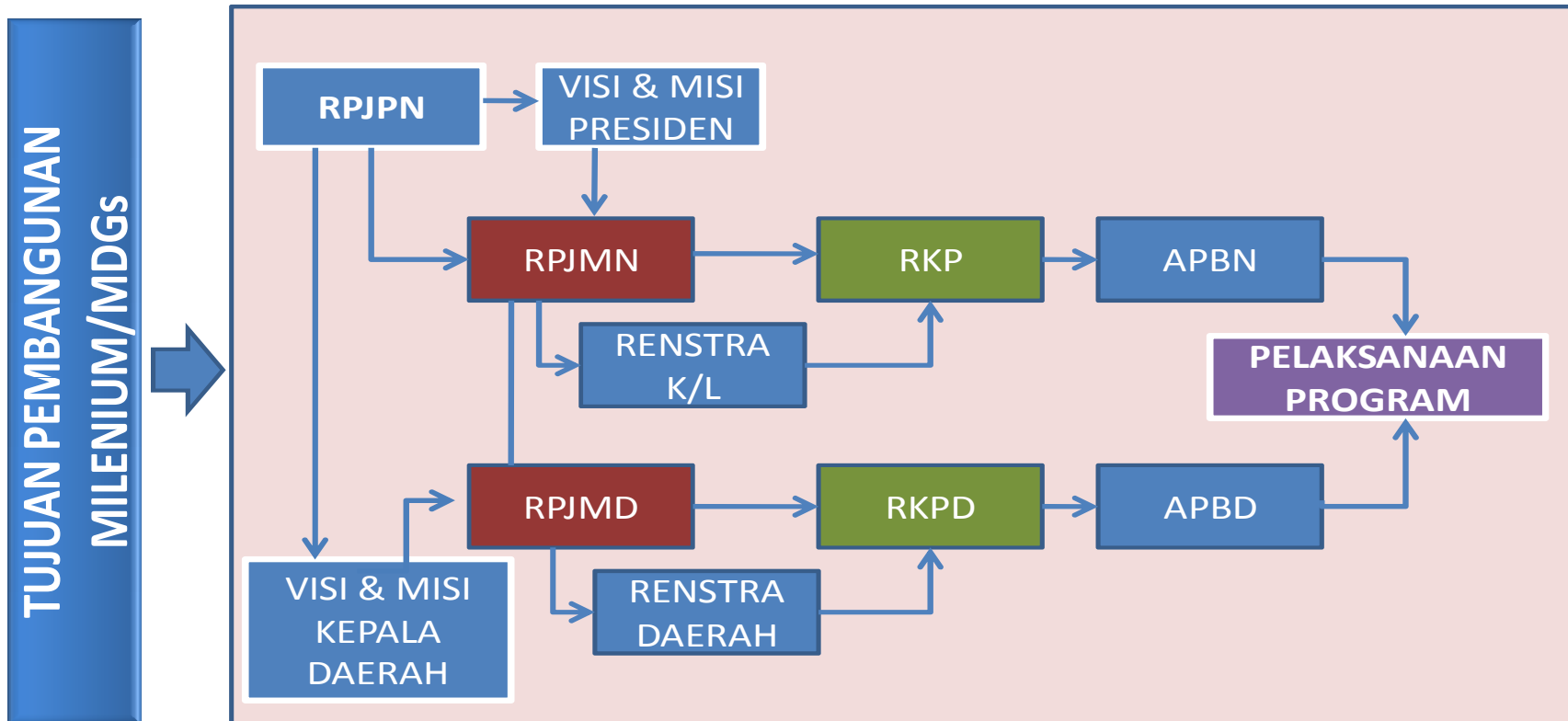


Sumber: Susenas 2011, BPS



UPAYA PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs DI INDONESIA

Integrasi MDGs Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan di Pusat dan Daerah



MDGS telah diarusutamakan dalam berbagai dokumen perencanaan NASIONAL (RPJPN, RPJMN, RKP), perencanaan K/L (RENSTRA, RENJA KL) dan implementasi pembiayaan dalam dokumen anggaran (DIPA)

Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan

- **Menginstruksikan antara lain kepada : Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II; Para Gubernur; Para Bupati/Walikota**
- **Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan antara lain meliputi program Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals - MDG').**



Implementasi Inpres No. 3 Tahun 2010



1. Integrasi MDGs ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran Pemerintah baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota
2. Penyusunan **Peta Jalan (*roadmap*) Percepatan Pencapaian MDGs di Indonesia**
3. Pembentukan **Tim Koordinasi MDGs Nasional**
4. Penyusunan **Rencana Aksi Daerah (RAD) percepatan pencapaian MDGs di 33 Provinsi**
 1. Penyusunan **pedoman teknis Rencana Aksi Daerah (RAD) MDGs Provinsi**
 2. Pelaksanaan **fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) MDGs Provinsi** oleh Tim Koordinasi MDGs Nasional kepada Tim Koordinasi MDGs Provinsi
 3. Penyusunan **pedoman teknis Definisi Operasional Indikator MDGs**
 4. Penyusunan **pedoman teknis Review RAD MDGs Provinsi**
 5. Penyusunan **pedoman teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RAD MDGs Provinsi**



Implementasi Inpres No. 3 Tahun 2010



5. Penetapan **Surat Edaran MenPPN/Kepala Bappenas dengan Mendagri** tentang Percepatan Pencapaian Sasaran MDGs 2011-2015
6. Peningkatan dukungan pembiayaan untuk percepatan pencapaian MDGs
 1. **Public Private Partnership (PPP)**
 2. **Corporate Social Responsibilities (CSR)**
7. Penyusunan **Pedoman Pemberian Insentif Bagi Daerah Untuk Mendukung Percepatan Pencapaian MDGs**
8. Pelaksanaan **diseminasi dan advokasi** percepatan pencapaian MDGs kepada seluruh stakeholders
9. Penguatan **monitoring dan evaluasi MDGs**
10. Pemberian **MDGs Award**
11. Penguatan ketersediaan **data dan informasi** mengenai indikator-indikator MDGs

**Upaya Untuk Mendorong Agar Daerah
Menyusun
Perencanaan, Penganggaran dengan
Prioritas Pencapaian Tujuan MDGs:**

**Surat Edaran Nomor: 0068/M.PPN/02/2012 dan
Nomor: 050/583/SJ
Tentang Percepatan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Milenium
(Millennium Development Goals)
Tahun 2011-2015**



MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 22 Februari 2012

Kepada Yth.
Para Gubernur
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR: 0068/M.PPN/02/2012
NOMOR: 050/583/SJ

TENTANG

Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium
(*Millennium Development Goals*) Tahun 2011-2015

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan, khususnya yang berkaitan dengan percepatan pencapaian Tujuan *Millennium Development Goals* (MDGs) diminta perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut:

1. Segera melakukan percepatan pencapaian 7 (tujuh) tujuan, 15 (lima belas) target dan 41 (empat puluh satu) indikator MDGs sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Edaran ini.
2. Dalam menyusun program dan kegiatan serta pengalokasian anggaran dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah agar mengacu pada RAD MDGs di masing-masing provinsi untuk percepatan pencapaian tujuan target dan indikator MDGs
3. Melakukan pengendalian dan evaluasi percepatan pencapaian tujuan, target dan indikator MDGs.

- 2 -

5. Melaporkan pencapaian percepatan MDGs kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS,



Tembusan Ditujukan Kepada Yth:

1. Bapak Presiden RI;
2. Bapak Wakil Presiden RI; dan
3. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu.

Percepatan Pencapaian MDGs di Kabupaten / Kota

- 1. Pada tahun 2012 Kabupaten/Kota diharapkan membuat RAD MDGs dengan fokus pengisian matriks dibawah koordinasi Tim MDGs Provinsi**
- 2. Legal aspek untuk RAD MDGs Kab/Kota:**
 - 1. Inpres 3 tahun 2010**
 - 2. RAD MDGs Kabupaten / Kota ditetapkan didalam Perbup atau Perwali**
- 3. Memperkuat Provinsi untuk memfasilitasi penyusunan RAD MDGs tingkat Kabupaten/Kota**
- 4. Fasilitasi Pusat kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun RAD MDGs**



PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DI DAERAH DALAM PENCAPAIAN TARGET MDGs

- 1. Fokus perhatian terutama diarahkan terhadap pencapaian tujuan, target dan indikator MDGs yang masih perlu perhatian khusus**
- 2. Memperkecil disparitas antar daerah dalam pencapaian target MDGs**
- 3. Menjamin dan mengawal target tahunan indikator MDGs pada Kementerian Lembaga di Pusat dan SKPD di Daerah dengan didukung oleh sumber daya yang memadai**
- 4. Pengalokasian sumber daya kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota yang kinerja pencapaian tujuan, target dan indikator MDGs masih dibawah rata-rata**

Lanjutan...

- 5. Memperkuat koordinasi perencanaan dan penganggaran pada Kementerian Lembaga dan SKPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota**
- 6. Memperkuat komitmen DPR dan DPRD serta sektor swasta dan masyarakat dalam mendukung pembiayaan MDGs**
- 7. Memberikan insentif kepada daerah yang menunjukkan kinerja pencapaian MDGs yang baik**
- 8. Memperkuat monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, target dan indikator MDGs**

PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENCAPAIAN MDGs

Goals	Pemangku Kepentingan
TUJUAN 1 : MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN	Bapermasdes, BPS, BKKBN, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Biro Keuangan, BPMD, Disnakertransduk, Disperindag, Biro Perekonomian, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Perbankan, BPS
TUJUAN 2 : MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA	Dinas Pendidikan, Kemenag, BPS
TUJUAN 3 : MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	BP3AKB, Dinas Pendidikan, Disnakertransduk, Badan Kesbangpol, KPPI, BPS
TUJUAN 4 : MENURUNKAN KEMATIAN ANAK	Dinas Kesehatan, BPS

PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENCAPAIAN MDGs

Goals	Pemangku Kepentingan
TUJUAN 5 : MENINGKATKAN KESEHATAN IBU	Dinas Kesehatan, TP PKK, BKKBN, BP3AKB, BPS
TUJUAN 6 : MENGENDALIKAN HIV DAN AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA (TB)	Dinkes, KPA, BP3AKB
TUJUAN 7 : MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Kehutanan, BLH, Dinas ESDM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PU, Bapermasdes, BPS
TUJUAN 8 : MENGEMBANGKAN KEMITRAAN PEMBANGUNAN DI TINGKAT GLOBAL	Perbankan, Kominfo, BPS

TERIMA KASIH



Sekretariat MDGs Nasional

Wisma Bakrie 2, Lt 6

Jl. HR Rasuna Said, Kav. B2,

Jakarta Selatan 12920

Telepon/Fax: (021) 57945716

Email: sekretariatmdgs@bappenas.go.id